



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satunya dengan menghadirkan Sistem Informasi (SI) yang membawa perkembangan baru dalam berbagai bidang kehidupan, Sistem Informasi (SI) digunakan sebagai perubahan dari sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi, sehingga sistem manual sudah banyak ditinggalkan, mengingat sistem terkomputerisasi memiliki banyak kelebihan. Manfaat sistem yang sudah terkomputerisasi saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat terutama di perkantoran, pusat perbelanjaan, perusahaan-perusahaan, rumah sakit dan sekolah-sekolah. Hal ini dikarenakan menggunakan sistem yang terkomputerisasi dinilai lebih efektif serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di banding menggunakan sistem lama yang masih bersifat manual.

Menurut Moh Fauzi (2018:1), “Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input (*processing*), memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer dan dapat menyimpan program dari hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komputer dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data, penyimpanan data dan menghasilkan sebuah informasi. Tentunya hal ini sangat membantu efisiensi dan efektifitas dalam berbagai pekerjaan, salah satunya pekerjaan pada instansi yang memang kesehariannya mengolah berbagai data.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang yang terletak di Jl. Merdeka No. 3, Palembang, merupakan salah satu instansi Dinas di tingkat Kota yang ada di Daerah Sumatera Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang. Dinas



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada saat ini terdapat 5 (lima) Bidang kerja pada Dinas ini yaitu, Bidang Sekretariat (Kepegawaian), Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS), Bidang Penyuluhan dan Penggerakan (PP), dan Bidang Keluarga Berencana (KB). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga telah memiliki fasilitas komputer yang memadai untuk dapat digunakan sebagai sarana dalam menangani berbagai macam pekerjaan. Namun hingga saat ini masih banyak kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang yang belum menggunakan teknologi yang efisien dalam pengolahan dan pengelolaan datanya, salah satunya data perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas merupakan tugas kedinasan yang dilakukan oleh pegawai di luar area instansi guna melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi. Meskipun dilakukan demi kepentingan instansi, pelaksanaannya tidak dilakukan secara sembarangan, pegawai harus diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas atau biasa disingkat dengan SPPD yang telah disetujui oleh atasan atau pihak yang berwenang sebelum melakukan perjalanan dinas. Sebagai instansi yang pegawainya melakukan perjalanan dinas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang juga mengeluarkan SPPD sebagai surat pengantar perjalanan dinas pegawai.

Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas merupakan pegawai yang ditunjuk langsung oleh kepala bidang kerja masing-masing, selanjutnya pegawai tersebut harus melaporkan kepada Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan membawa Nota Pengajuan Perjalanan Dinas. Petugas yang berwenang akan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT). Setelah itu Kasubbag Umum dan Kepegawaian akan memberi paraf pada SPPD dan SPT tersebut yang kemudian di tandatangani oleh Kepala Dinas.



Selanjutnya barulah diproses nota dan kwitansi perjalanan dinas tersebut oleh bendahara di bagian keuangan agar dapat segera dicairkan.

Namun, selama ini dalam pembuatan Nota Pengajuan, SPPD, SPT, nota dinas dan kwitansi dinas masih menggunakan *Microsoft Word dan Microsoft Excel* dimana surat yang diketik hanya disimpan sementara dan harus dilakukan pengeditan setiap kali akan membuat SPPD, SPT, nota dan kwitansi baru. Selain itu, dokumen yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut rentan hilang karena tidak adanya *back-up* data pada aplikasi yang akan menyulitkan proses pencarian data jika *hardcopy* yang diarsip tidak ada atau sedang dipegang oleh pihak lain. Dalam proses pembuatan SPPD, SPT, nota dan kwitansi yang dilakukan selama ini juga masih ditemukan banyak kekurangan yang harus dihadapi seperti terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengetikan dan penginputan data, bahkan kesalahan dalam pemberian nomor surat, sehingga pembuatan dokumen tersebut harus dilakukan berulang-ulang. Hal ini mengakibatkan banyaknya kertas yang terbuang, selain itu waktu yang dibutuhkan juga menjadi lebih lama.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu sistem yang dapat membantu dalam proses pembuatan Nota Pengajuan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas (SPT), Nota Dinas dan Kwitansi Dinas yang akan dibahas lebih lanjut dalam suatu pokok pembahasan dengan judul **“Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Website Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah “bagaimana cara membangun suatu Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis *Website* pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang sebagai sarana pengelolaan data perjalanan dinas yang efektif dan efisien?”.

---



### 1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dibatasi pokok permasalahan yang akan dibahas hanya pada :

- 1) Sistem Informasi Perjalanan Dinas ini ditujukan kepada internal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.
- 2) Sistem Informasi ini hanya dapat diakses oleh admin kepegawaian, admin keuangan, kasubbag, pegawai, dan kepala dinas.
- 3) Sistem Informasi ini memiliki fungsi sebagai media dalam pembuatan Nota Pengajuan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas (SPT), Kwitansi Dinas, Nota Dinas, dan Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas, serta *upload* Laporan Perjalanan Dinas bagi para pegawai.
- 4) Sistem Informasi ini berbasis *website* dan menggunakan metode pengembangan sistem RUP (*Relational Unified Process*).

### 1.4 Tujuan dan Manfaat

#### 1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan Sistem Informasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menciptakan suatu Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis *Website* Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.
- 2) Menyediakan basis data yang akurat dan efisien dalam mengelola data perjalanan dinas bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palembang.
- 3) Meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam penginputan data perjalanan dinas yang selama ini masih menggunakan *Microsoft Office* sehingga



menyebabkan pembuatan surat perintah perjalanan dinas memakan waktu yang lama.

#### **1.4.2 Manfaat**

Adapun manfaat dari pembuatan Sistem Informasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Informasi Perjalanan Dinas ini akan membantu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pembuatan Nota Pengajuan Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Surat Perintah Tugas (SPT), Nota Dinas, Kwitansi Dinas, dan Laporan secara cepat, efektif, dan efisien.
- 2) Mempermudah dalam pencarian informasi Perjalanan Dinas pegawai yang telah dibuat sebelumnya.
- 3) Membantu pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang dalam pembuatan surat berkaitan dengan perjalanan dinas agar menjadi lebih teratur dan tertib sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan dalam penginputan data.

### **1.5 Metodologi Pelaksanaan Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang terletak di Jl. Merdeka No.3, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30136, dengan waktu pelaksanaan yang dimulai pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan selesai.

#### **1.5.2 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Nugraheni (2019:135) “Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Informasi yang relevan diambil sarinya dan dicatat pada kartu informasi. Di samping pencarian informasi dari kepustakaan, penyusun juga dapat memulai terjun ke lapangan. Akan tetapi,



sebelum terjun ke lapangan, penyusun minta izin kepada pemerintah setempat atau kepada pimpinan perusahaan yang perusahaannya akan diteliti. Data di lapangan dapat dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara atau eksperimen (percobaan)”.

Ada 2 jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan Laporan Akhir ini yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dan diolah sendiri oleh suatu perusahaan.

a. Observasi Partisipatif

Observasi Partisipatif artinya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Disini penulis mengamati apa yang dikerjakan pada satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan *interview* kepada pegawai dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang terhadap apa yang dilakukan, dikelola, dihasilkan dan dilaporkan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya berupa sumber informasi seperti buku dan internet. Dari mengumpulkan data dan informasi diperlukan dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan meliputi laporan akhir dari alumni-alumni, *browsing* internet, meminjam buku hingga mengumpulkan



data-data dari pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.

### **1.5 Sistematika Penulisan Laporan**

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Laporan Akhir ini, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab. Secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan garis besar mengenai Laporan Akhir ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai teori- - teori keilmuan yang mendasari masalah yang diteliti, dimana terdiri dari teori umum, teori judul, teori khusus, dan teori program.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang, visi dan misi, struktur organisasi, serta hal lain yang berhubungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan dari masalah yang ada melalui Analisis mulai dari spesifikasi dan rancangan perangkat lunak yang akan dibuat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palembang.



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan dianalisa. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.